

Tinjauan Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Hutang PPh Pasal 22 Kepada Wajib Pajak

Farhan Ali Akbar

Abstrak

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Ketentuan Umum Perpajakan, Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Yang menerbitkan STP adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Terbitnya STP ini biasanya disebabkan Wajib Pajak tidak melakukan satu atau beberapa kewajiban pajak yang diamanatkan oleh Undang-undang. Dalam perpajakan, STP sendiri mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Seperti telah diuraikan, apabila terdapat data SP3DRI (Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor) yang tidak atau kurang bayar atas PPN/PPnBM Impor maka akan diterbitkan dan SKPKB/SKPKBT tetapi kalau atas PPh Pasal 22 akan diterbitkan STP.

Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.

Kata Kunci : Surat Tagihan Pajak (STP), PPh Pasal 22, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Review of Issuance of Tax Collection Letter (STP) Income Tax Payable

Article 22 To Taxpayers

Farhan Ali Akbar

Abstract

Based on Article 1 number 20 of the General Tax Provisions and Procedures Law, the Tax Collection Letter (STP) is a letter for conducting tax invoice and / or administrative sanction in the form of interest and / or fine. The issuing STP is the Tax Service Office (KPP) where a person or entity is registered as a Tax Payer. The publication of STP is usually caused by the Taxpayer does not perform one or several tax obligations mandated by the Law. In taxation, STP itself has the same legal force as the Tax Assessment Letter (SKP). As described, if there is data of SP3DRI (Tax Receipt Notification Letter in Import Framework) which is not or underpay on VAT / Luxury Tax Sales Import then it will be issued and Tax Underpayment Assessment / Additional Tax Underpayment Assessment, but if on Article 22 Income Tax will be issued Tax Collection Letter.

Article 20 Paragraph (1) of Law Number 6 of 1983 concerning General Tax Provisions and Tax Procedures as amended several times, the latest by Law Number 16 Year 2009 states that taxes expected to be payable in a tax year. It shall be paid by Taxpayers in the current tax year through withholding and collection of taxes by other parties, as well as tax payments by the Taxpayers themselves.

Keywords : *Tax Collection Letter, Income Tax Article 22, Tax Underpayment Assessment Letter*